



LOCAL DEMOCRACY AND COMMUNITY PARTICIPATION A CASE STUDY OF THE OPPOSITION TO THE JAKARTA BAY RECLAMATION

DEMOKRASI LOKAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT STUDI KASUS PENOLAKAN REKLAMASI TELUK JAKARTA

Canda Della Agustia Disy¹, Salwa Adina Zafira², Chayara Alima Rameyza Elya³, Putri Salsadila⁴, Ridwan⁵, Maisarah Mitra Adrian⁶

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2410413006@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410413019@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2410413020@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410413036@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, ridwan.fisip@upnvj.ac.id⁵, 25069030@upnvj.ac.id⁶

ARTICLE INFO

Correspondent

Canda Della Agustia Disy
2410413006@mahasiswa.upnvj.ac.id

Key words:

Local Democracy, Community Participation, Jakarta Bay Reclamation, Social Movement, Public Policy

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 321 - 330

ABSTRACT

This study examines local democracy and community participation in the rejection of the Jakarta Bay reclamation project as a case study of public policy conflict in Indonesia. The research aims to analyze the implementation of local democracy, the forms of community participation and mobilization, and the power relations between the state, market, and society in the Jakarta Bay reclamation policy. This study uses Andrew Heywood's theory of local democracy, Sidney Tarrow's social movement theory, and David Harvey's perspective on power relations and capitalism. The research applies a qualitative approach with a case study method and uses secondary data collected through library research, digital literature studies, and documentation. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that local democracy in the Jakarta Bay reclamation case has not been fully participatory and inclusive because the policy-making process was dominated by government and investor interests. Community participation emerged through demonstrations, legal advocacy, public campaigns, and social movements organized by civil society organizations such as KSTJ, KIARA, WALHI, LBH Jakarta, and KNTI. Although these movements succeeded in increasing public awareness and policy oversight, their influence on policy change remained limited due to unequal power relations between the state, market, and society.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Canda Della Agustia Disy
2410413006@mahasiswa.u
pnvj.ac.id

Kata kunci:

**Demokrasi Lokal,
Partisipasi Masyarakat,
Reklamasi Teluk Jakarta,
Gerakan Sosial, Kebijakan
Publik**

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 321 - 330

ABSTRAK

Penelitian ini membahas demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam penolakan reklamasi Teluk Jakarta sebagai studi kasus konflik kebijakan publik di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan demokrasi lokal, bentuk partisipasi dan mobilisasi masyarakat, serta relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat dalam kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi lokal Andrew Heywood, teori gerakan sosial Sidney Tarrow, serta perspektif relasi kuasa dan kapitalisme David Harvey. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi literatur digital, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi lokal dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta belum berjalan secara partisipatif dan inklusif karena proses pengambilan kebijakan masih didominasi oleh kepentingan pemerintah dan investor. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui demonstrasi, advokasi hukum, kampanye publik, dan gerakan sosial yang dimobilisasi oleh organisasi masyarakat sipil seperti KSTJ, KIARA, WALHI, LBH Jakarta, dan KNTI. Meskipun gerakan masyarakat berhasil meningkatkan perhatian publik terhadap dampak reklamasi, pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan masih terbatas akibat ketimpangan relasi kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Demokrasi lokal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan desentralistik di Indonesia yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam kerangka ini, partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan formal dalam prosedur demokrasi, tetapi juga sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan publik (Hadiz, 2010). Implementasi otonomi daerah memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan publik di tingkat lokal. Namun demikian, dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan sering kali masih didominasi oleh kepentingan elite politik dan ekonomi sehingga demokrasi lokal cenderung berjalan secara prosedural, bukan substantif (Robison & Hadiz, 2004). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan demokrasi lokal sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi masyarakat dan keterbukaan pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi publik. Partisipasi masyarakat menjadi elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis karena tidak hanya mencakup keterlibatan dalam pemilu, tetapi juga keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti konsultasi publik, demonstrasi, advokasi, hingga gerakan sosial. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kualitas demokrasi yang

baik sekaligus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan wilayah perkotaan yang semakin pesat menuntut pemerintah daerah menyediakan fasilitas publik yang memadai bagi masyarakat. Salah satu aspek penting pembangunan kota ialah ruang publik yang berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, rekreasi, dan aktivitas masyarakat secara terbuka.

Ruang publik dipandang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota dan mendorong interaksi sosial yang inklusif (Gehl, 2011). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perkotaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan (Sushanti, Yuniati, & Angelia, 2021). Pasca reformasi 1998, ruang demokrasi yang semakin terbuka mendorong tumbuhnya berbagai gerakan masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbang terhadap dominasi negara dan pasar. Kehadiran masyarakat sipil diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan publik tetap mencerminkan aspirasi masyarakat luas dan menjunjung prinsip keadilan sosial (Alamsyah & Samadhi, 2023). Akan tetapi, dalam praktiknya partisipasi masyarakat sering menghadapi ketimpangan relasi kuasa antara pemerintah, pemilik modal, dan kelompok masyarakat sehingga berpotensi memarginalkan kelompok rentan (Harvey, 2005).

Fenomena tersebut terlihat pada kasus reklamasi Teluk Jakarta. Proyek reklamasi yang berlangsung pada periode 2016–2018 dengan rencana pembangunan 17 pulau buatan bertujuan mengatasi keterbatasan lahan dan mendukung pembangunan ekonomi Jakarta. Namun kebijakan ini memunculkan kontroversi karena dinilai lebih mengakomodasi kepentingan ekonomi dan investasi dibanding kepentingan masyarakat luas (Firman, 2017). Reklamasi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang signifikan terhadap masyarakat pesisir, terutama nelayan yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut (Simamora et al., 2023). Dampak reklamasi mencakup penurunan hasil tangkapan nelayan, hilangnya wilayah budidaya kerang hijau, meningkatnya risiko banjir rob, serta ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Selain berdampak pada aspek ekonomi, kondisi ini turut memunculkan kerentanan sosial yang lebih besar bagi kelompok tertentu termasuk perempuan yang mengalami beban ganda dalam rumah tangga (Alamsyah & Samadhi, 2023). Dengan demikian, reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya menjadi isu pembangunan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan demokrasi lokal, keadilan sosial, dan hak masyarakat terhadap ruang hidup. Polemik reklamasi Teluk Jakarta memperlihatkan persoalan serius dalam penerapan prinsip good governance, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Aspirasi masyarakat sering kali diabaikan atau hanya dijadikan formalitas dalam proses pengambilan keputusan (Dwiyanto, 2006). Kondisi tersebut memunculkan berbagai bentuk resistensi masyarakat melalui demonstrasi, advokasi hukum, maupun mobilisasi gerakan sosial. Berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), KIARA, WALHI, LBH Jakarta, dan KNTI berperan aktif dalam mengorganisir penolakan terhadap reklamasi melalui gugatan hukum, kampanye publik, serta advokasi kebijakan (Alamsyah & Samadhi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat berkembang menjadi kekuatan politik yang berpengaruh terhadap kebijakan publik (Tarrow, 2011). Namun efektivitas partisipasi tersebut dalam memengaruhi keputusan pemerintah masih menjadi persoalan penting karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat (Harvey, 2005). Kasus reklamasi Teluk Jakarta menunjukkan adanya persoalan dalam praktik

demokrasi lokal, khususnya terkait partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Meskipun secara normatif demokrasi lokal menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam menentukan arah kebijakan, dalam praktiknya proses tersebut sering kali dipengaruhi oleh dominasi kepentingan negara dan pasar sehingga partisipasi masyarakat berpotensi hanya bersifat formalitas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme demokrasi lokal dalam kebijakan reklamasi Teluk Jakarta telah berjalan secara partisipatif dan inklusif, faktor yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat dalam penolakan reklamasi, bagaimana proses mobilisasi gerakan sosial dilakukan, serta sejauh mana pengaruh partisipasi tersebut terhadap perubahan maupun keberlanjutan kebijakan reklamasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis karakter partisipasi masyarakat dalam kebijakan reklamasi Teluk Jakarta, khususnya untuk menilai apakah partisipasi tersebut bersifat substantif atau hanya simbolik dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relasi kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat yang membentuk dinamika kebijakan reklamasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai bentuk marginalisasi yang dialami masyarakat dalam praktik demokrasi lokal. Penelitian ini berupaya menganalisis kapasitas gerakan masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan publik, termasuk mengungkap batas-batas kekuatan yang mereka miliki di tengah dominasi struktur kekuasaan. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas demokrasi lokal dalam praktik kebijakan publik di Indonesia sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih partisipatif.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan relevansi isu ini. Alamsyah dan Samadhi (2023) menemukan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memperkuat partisipasi publik dan pengawasan kebijakan pemerintah. Simamora et al. (2023) menjelaskan dampak sosial dan ekologis reklamasi terhadap masyarakat pesisir. Rizqiah dan Marzaman (2023) menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan laut dan terganggunya mata pencaharian masyarakat akibat reklamasi. Sushanti, Yuniati, dan Angelia (2021) menekankan pentingnya ruang publik yang inklusif dalam pembangunan kota berkelanjutan, sedangkan Royandi dan Keiya (2019) memperlihatkan adanya kontestasi antara negara, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir Teluk Jakarta. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terbentuk, bagaimana proses mobilisasinya, serta sejauh mana pengaruh partisipasi tersebut terhadap perubahan kebijakan dalam perspektif demokrasi lokal sehingga kesenjangan penelitian tersebut menjadi dasar rasionalisasi penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa demokrasi lokal yang ideal menuntut partisipasi masyarakat yang substantif dalam proses pengambilan keputusan publik. Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam kebijakan, semakin tinggi kemungkinan terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan publik. Namun pengaruh partisipasi masyarakat tersebut diperkirakan tetap dibatasi oleh dominasi relasi kuasa antara negara dan pasar dalam kebijakan reklamasi.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian kritis dalam ilmu politik, khususnya terkait demokrasi lokal, partisipasi masyarakat, serta relasi negara, pasar, dan masyarakat dalam konteks kebijakan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai dinamika gerakan sosial dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan publik. Secara praktis, penelitian ini

diharapkan menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah agar partisipasi masyarakat tidak hanya dibuka secara formal, tetapi juga memiliki pengaruh nyata dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang berfokus pada fenomena demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam penolakan reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian dilakukan di wilayah Teluk Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus kajian pada polemik reklamasi periode 2016–2018 untuk memahami secara mendalam dinamika hubungan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kepentingan ekonomi-politik dalam proses kebijakan publik. Objek penelitian meliputi mekanisme demokrasi lokal, bentuk mobilisasi masyarakat sipil, relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat, serta pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kebijakan reklamasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi literatur digital, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui kajian buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, berita media massa, serta publikasi organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan reklamasi Teluk Jakarta. Selain itu, dokumentasi berupa foto, laporan advokasi, dan arsip pemberitaan digunakan sebagai bahan pendukung analisis penelitian. Keseluruhan data kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terbentuk, dimobilisasi, dan mempengaruhi kebijakan reklamasi dalam praktik demokrasi lokal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Reklamasi Teluk Jakarta

Reklamasi Teluk Jakarta merupakan proyek pembangunan wilayah pesisir yang bertujuan untuk menciptakan daratan baru melalui proses pengurukan laut. Proyek ini direncanakan dalam bentuk pembangunan 17 pulau buatan di kawasan pesisir utara Jakarta sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan perkotaan dan ekonomi. Pemerintah beralasan bahwa reklamasi dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan, mendukung pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Firman, 2017).

Namun, sejak awal kebijakan ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa reklamasi lebih mengutamakan kepentingan investor dan kelompok ekonomi tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat pesisir yang terdampak langsung (Mahdi, 2017). Konflik semakin meningkat ketika proyek reklamasi dianggap mengancam mata pencaharian nelayan, merusak ekosistem laut, serta memperbesar risiko banjir rob di wilayah pesisir Jakarta (Rizqiah & Marzaman, 2023). Selain menimbulkan persoalan lingkungan, reklamasi juga memunculkan perdebatan mengenai praktik demokrasi lokal dalam proses pengambilan kebijakan. Masyarakat menilai bahwa proses penyusunan kebijakan reklamasi kurang melibatkan partisipasi publik secara substantif. Aspirasi masyarakat pesisir sering kali tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses pembangunan, sehingga memunculkan berbagai bentuk penolakan dan gerakan sosial (Alamsyah & Samadhi, 2023).

Demokrasi Lokal dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta

Dalam sistem demokrasi lokal, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik. Demokrasi lokal pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun kepentingannya terhadap arah pembangunan daerah. Menurut Andrew Heywood, demokrasi tidak cukup hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan umum, tetapi juga sebagai proses partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan publik (Heywood, 2013). Dalam konteks reklamasi Teluk Jakarta, prinsip demokrasi lokal tersebut belum sepenuhnya berjalan secara substantif karena proses pengambilan kebijakan masih menunjukkan dominasi pemerintah dan pemilik modal dibandingkan masyarakat pesisir yang terdampak langsung. Pemerintah daerah memandang reklamasi sebagai proyek strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan bisnis dan properti baru. Namun, orientasi pembangunan tersebut justru memunculkan kritik luas karena dinilai lebih mengutamakan kepentingan investasi dibandingkan kepentingan masyarakat secara umum. Banyak masyarakat pesisir merasa tidak memperoleh ruang partisipasi yang memadai dalam proses penyusunan kebijakan reklamasi.

Walaupun pemerintah membuka forum konsultasi publik, partisipasi masyarakat dinilai hanya bersifat formalitas administratif dan tidak benar-benar mempengaruhi keputusan akhir pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal masih berada pada level simbolik, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berbicara tetapi tidak memiliki kekuatan nyata untuk menentukan arah kebijakan. Selain itu, lemahnya transparansi pemerintah dalam proses perizinan dan penyusunan kebijakan semakin memperkuat kritik terhadap praktik demokrasi lokal dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. Informasi mengenai dampak lingkungan, proses pembangunan, dan kepentingan investor tidak sepenuhnya terbuka kepada publik sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam perspektif David Harvey, pembangunan dalam sistem kapitalisme neoliberal sering kali lebih berpihak pada kepentingan akumulasi modal sehingga kepentingan masyarakat kecil menjadi terpinggirkan (Harvey, 2005). Hal ini terlihat jelas dalam proyek reklamasi yang lebih menekankan pembangunan kawasan ekonomi dan properti dibandingkan perlindungan lingkungan hidup serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Dengan demikian, kasus reklamasi Teluk Jakarta memperlihatkan bahwa demokrasi lokal tidak selalu menghasilkan kebijakan yang demokratis apabila relasi kekuasaan masih didominasi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Meskipun secara formal terdapat mekanisme partisipasi, dalam praktiknya masyarakat belum memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan publik secara substantif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi lokal dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta masih menghadapi persoalan mendasar terkait inklusivitas, transparansi, dan distribusi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bentuk Partisipasi dan Mobilisasi Masyarakat

Penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta memunculkan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan secara kolektif melalui gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil. Partisipasi ini tidak hanya dilakukan oleh nelayan sebagai kelompok yang terdampak langsung, tetapi juga melibatkan aktivis lingkungan, akademisi,

mahasiswa, organisasi bantuan hukum, hingga media massa yang turut mengawal isu reklamasi. Munculnya gerakan penolakan tersebut dipengaruhi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap proses kebijakan yang dianggap tidak transparan dan tidak berpihak pada masyarakat pesisir. Nelayan merasa bahwa reklamasi mengancam keberlangsungan hidup mereka karena wilayah tangkap ikan semakin menyempit dan kualitas lingkungan laut mengalami kerusakan akibat proses pembangunan pulau-pulau reklamasi. Selain itu, masyarakat pesisir juga khawatir terhadap meningkatnya risiko banjir rob dan pencemaran lingkungan yang dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi mereka.

Dalam menghadapi situasi tersebut, berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), KIARA, WALHI, LBH Jakarta, dan KNTI memainkan peran penting dalam mengorganisir gerakan penolakan reklamasi melalui berbagai strategi advokasi dan mobilisasi massa. Bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya berupa demonstrasi dan aksi protes di ruang publik, tetapi juga melalui jalur hukum, kampanye media, diskusi publik, dan penyebaran informasi mengenai dampak reklamasi kepada masyarakat luas. Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk tekanan politik terhadap pemerintah daerah agar menghentikan proyek reklamasi dan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat pesisir. Sementara itu, advokasi hukum dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap izin reklamasi yang dinilai melanggar prinsip keadilan lingkungan dan partisipasi publik. Selain itu, media sosial dan media massa juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun opini publik serta memperluas dukungan terhadap gerakan penolakan reklamasi.

Dalam perspektif Sidney Tarrow, gerakan sosial muncul ketika masyarakat secara kolektif melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan melalui aksi kolektif yang terorganisir (Tarrow, 2011). Hal tersebut terlihat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, di mana masyarakat tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif membangun jaringan solidaritas dan mobilisasi politik untuk memperjuangkan hak-haknya dalam ruang demokrasi lokal. Partisipasi masyarakat dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal pemerintahan, tetapi juga melalui gerakan sosial di ruang publik sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan negara.

Relasi Kekuasaan antara Negara, Pasar, dan Masyarakat

Kasus reklamasi Teluk Jakarta menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang kompleks antara negara, pasar, dan masyarakat dalam proses pembangunan perkotaan. Pemerintah sebagai representasi negara memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam proyek reklamasi yang dianggap sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi Jakarta. Akan tetapi, dalam praktiknya, kebijakan reklamasi tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan negara, tetapi juga oleh kepentingan pasar, khususnya investor dan pengembang properti yang memiliki modal besar dalam proyek reklamasi. Reklamasi Teluk Jakarta pada dasarnya merupakan proyek ekonomi berskala besar yang bertujuan menciptakan kawasan bisnis, properti, dan investasi baru di wilayah pesisir Jakarta. Oleh karena itu, kepentingan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam proses pengambilan kebijakan.

Dalam perspektif David Harvey, pembangunan dalam sistem kapitalisme neoliberal cenderung diarahkan untuk mendukung akumulasi modal sehingga kepentingan kelompok elite ekonomi menjadi lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat luas (Harvey, 2005). Hal tersebut terlihat dalam proyek reklamasi yang lebih

mengutamakan pembangunan kawasan ekonomi modern dibandingkan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir. Akibat dominasi negara dan pasar tersebut, masyarakat pesisir berada pada posisi yang relatif lemah dalam relasi kekuasaan. Nelayan dan masyarakat pesisir memiliki keterbatasan akses terhadap proses pengambilan keputusan sehingga sering kali hanya menjadi objek kebijakan pembangunan. Mereka tidak memiliki sumber daya politik dan ekonomi yang cukup kuat untuk bersaing dengan kekuatan pemerintah dan investor.

Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai bentuk marginalisasi sosial dan ekonomi, seperti berkurangnya wilayah tangkap ikan, menurunnya pendapatan nelayan, kerusakan ekosistem laut, hingga meningkatnya kerentanan sosial masyarakat pesisir akibat perubahan lingkungan. Selain itu, masyarakat pesisir juga menghadapi ancaman kehilangan ruang hidup karena pembangunan reklamasi mengubah struktur sosial dan tata ruang wilayah pesisir Jakarta. Dalam kondisi tersebut, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbesar ketimpangan sosial antara kelompok yang memperoleh keuntungan ekonomi dan kelompok yang menanggung dampak negatif pembangunan. Meskipun demikian, masyarakat tidak sepenuhnya kehilangan kapasitas untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi negara dan pasar melalui advokasi hukum, mobilisasi massa, dan jaringan solidaritas sosial.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kebijakan Reklamasi

Partisipasi masyarakat dalam penolakan reklamasi Teluk Jakarta memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap dinamika kebijakan publik meskipun pengaruh tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan dominasi kepentingan politik dan ekonomi dalam proses pembangunan. Gerakan masyarakat sipil berhasil menjadikan isu reklamasi sebagai perhatian publik nasional sehingga pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengabaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat pesisir. Tekanan yang dilakukan melalui demonstrasi, kampanye publik, advokasi hukum, dan pemberitaan media membuat isu reklamasi tidak lagi dipandang hanya sebagai proyek pembangunan biasa, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial, lingkungan hidup, dan hak masyarakat atas ruang hidup.

Salah satu pengaruh penting dari partisipasi masyarakat adalah meningkatnya pengawasan publik terhadap kebijakan reklamasi serta munculnya kritik yang lebih luas terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan. Gerakan masyarakat sipil berhasil membuka ruang diskusi publik mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan pentingnya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terdampak kebijakan pembangunan. Selain itu, advokasi hukum yang dilakukan organisasi masyarakat sipil turut mempengaruhi proses evaluasi kebijakan reklamasi oleh pemerintah dan lembaga peradilan. Gugatan hukum yang diajukan masyarakat terhadap izin reklamasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melakukan perlawanan melalui aksi jalanan, tetapi juga menggunakan jalur hukum sebagai instrumen politik untuk mengontrol kebijakan negara.

Namun demikian, pengaruh partisipasi masyarakat masih memiliki keterbatasan karena kuatnya relasi antara negara dan pemilik modal dalam proyek reklamasi. Kepentingan investasi yang besar menyebabkan pemerintah tetap berupaya mempertahankan proyek reklamasi meskipun menghadapi penolakan masyarakat yang cukup luas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik demokrasi lokal, masyarakat masih menghadapi hambatan struktural untuk benar-benar mempengaruhi arah

kebijakan secara substantif. Meskipun demikian, kasus reklamasi Teluk Jakarta tetap memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk membangun gerakan kolektif dan memperjuangkan hak-haknya dalam ruang demokrasi lokal sehingga partisipasi masyarakat tetap menjadi elemen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi lokal dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta belum berjalan secara partisipatif dan inklusif. Meskipun masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, proses pengambilan kebijakan masih lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah dan investor dibandingkan kepentingan masyarakat pesisir yang terdampak langsung. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam kebijakan reklamasi cenderung bersifat formalitas dan belum memiliki pengaruh yang benar-benar substantif terhadap keputusan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal masih menghadapi persoalan ketimpangan relasi kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat.

Penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta muncul karena masyarakat pesisir, khususnya nelayan, merasakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek reklamasi. Reklamasi dinilai mengancam mata pencaharian nelayan, merusak ekosistem laut, serta meningkatkan kerentanan sosial masyarakat pesisir. Situasi ini kemudian mendorong terbentuknya gerakan sosial dan mobilisasi masyarakat sipil sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan kurang berpihak pada kepentingan publik. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui berbagai aksi kolektif seperti demonstrasi, kampanye publik, advokasi hukum, dan pengorganisasian gerakan sosial oleh organisasi seperti KSTJ, KIARA, WALHI, LBH Jakarta, dan KNTI. Gerakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menjadi kekuatan politik dalam mempengaruhi kebijakan publik, meskipun masih menghadapi keterbatasan akibat dominasi kepentingan negara dan pasar.

Dengan demikian, kasus reklamasi Teluk Jakarta memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi lokal di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Demokrasi lokal tidak cukup hanya membuka ruang partisipasi secara formal, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat memiliki pengaruh nyata dalam proses pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat penerapan prinsip demokrasi partisipatif dengan membuka ruang keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan substantif, khususnya dalam kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat pesisir. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan kebijakan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memperoleh akses informasi yang jelas dan terbuka sehingga dapat ikut mengawasi kebijakan publik. Bagi organisasi masyarakat sipil, penelitian ini menunjukkan pentingnya memperkuat solidaritas, advokasi, dan pendidikan politik agar partisipasi publik semakin kritis dan terorganisir. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai demokrasi lokal, gerakan sosial, dan konflik kebijakan publik dengan pendekatan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Syauiid, Willy Purna Samadhi, Program Studi, Magister Ilmu, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. Gerakan Demokrasi Kelompok Marginal: Perlawanan Nelayan Perempuan Terhadap Reklamasi Teluk. 8 (2023): 229-42.

- Gordon, Colin, and L E O Marshall. *Power/Know-Ledge Selected Interviews and Other Writings*, 1977.
- Harvey, David. *A Brief History of Neoliberalism*, n.d.
- Heywood, Andrew. *The Palgrave Macmillan Series: Politics*, 2013. <https://doi.org/10.1057/9781137328533>.
- Matthew b. Miles, A. Michael huberman, Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 2014.
- Nur 'Izzatul Hikmah, Adi Wibowo. *Analisis Spasial-Temporal Pulau Reklamasi Jakarta 2014-2024: Studi Kasus Pulau C, D dan G*. 14 (2025).
- Pakpahan, Kristina Magdalena. *The Impact Of Sea Wall Construction Reclamation On Female Clam Shellers*. 12, no. 1 (2023): 24–38.
- Puspasari, Reny, and Sri Turni. *Di Teluk Jakarta Impact Analysis Of Land Reclamation To Environment And Fisheries In Jakarta Bay*. 9, no. November (2017): 85–94.
- Rizqiah, Liza Faizah, and Atika Puspita Marzaman. *Analisis Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Perikanan dan Keragaman Sumber Daya Laut*. 2, no. 4 (2023): 247–53.
- Royandi, Eva. *Kontestasi Aktor Dalam Pengelolaan Sumber Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta*. 2 (n.d.): 77–98.
- Sage, The, Fathali M Moghaddam, and Publication Doi. *“Archive Ouverte UNIGE,”* 2017. <https://doi.org/10.4135/9781483391144>.
- Sidney Tarrow. *“Power In Movement: Social Movement and Contentious Politics,”* 2011.